

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) TEKNIS

Tanggal : 5 Februari 2024
Dari : Divisi Asuransi Umum dan Penjaminan
Rencana Pengadaan : Pengadaan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembuatan Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat

BAB I

Latar Belakang dan Tujuan

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk memberdayakan UMKM, pembukaan akses permodalan usaha kepada masyarakat dengan program utama yakni KUR telah diperkenalkan sejak 2007. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan relaksasi pada sisi kemudahan persyaratan kolateral/jaminan serta bunga kredit yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah perubahan dan penyesuaian kebijakan KUR berupaya untuk meningkatkan signifikansi peran dan benefit penyaluran KUR. Berbagai hasil riset, selama 3 tahun terakhir menunjukkan KUR telah memberi dampak positif baik pada sisi *economic value* maupun *social value*, di antaranya: KUR berdampak pada pendapatan usaha UMKM sampai dengan 50% dan berpotensi meningkatkan keuntungan sampai dengan 30%. Pada tatanan nasional, KUR mendorong terciptanya inklusi keuangan karena mampu menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat serta KUR berkontribusi pada pencapaian program prioritas nasional ketercapaian porsi kredit UMKM sebesar 30%, dimana tanpa intervensi Program KUR maka proporsi kredit UMKM secara nasional sesuai target sulit tercapai. Refleksi dari situasi pandemi covid-19, ketangguhan KUR ditunjukkan sebagai akselerator pemulihan UMKM. Melalui KUR, UMKM dapat bertahan pada masa pandemi, sehingga turut pula mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Memperhatikan *fact-finding* tersebut, memperlihatkan kebermanfaatan KUR sebagai program strategis yang bukan hanya berdampak pada individu level, namun pula secara nasional.

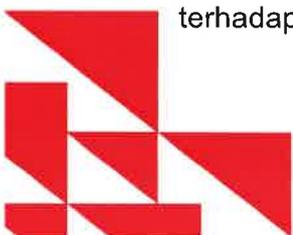
Sejak tahun 2007 hingga kini, KUR telah mengalami berbagai perubahan kebijakan, termasuk pada aspek skema KUR, yang terbagi menjadi 2 generasi, yakni Skema Penjaminan (KUR Generasi 1 2007 sd 2014), dan Skema Subsidi Bunga (KUR Generai 2, 2015-2023). Pada konsep awalnya, KUR menerapkan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yang dibayarkan kepada perusahaan



penjamin (asuradur) dengan menggunakan dana APBN sebagai bentuk sokongan pemerintah dalam memberikan kemudahan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat menengah kebawah. Pada sisi pemerintah, skema penjaminan ini dapat meminimalisir risiko fiskal tersendiri jika realisasi penyaluran KUR lebih besar dari target awal, sebagaimana terjadi selama 2007-2014 yang memaksa pemerintah mesti mencari dana tambahan untuk menutupi IJP kepada perusahaan penjaminan (Damayanti dan Adam, 2015). Namun, kelemahan skema IJP ini, debitur cenderung akan membayar bunga lebih mahal ketimbang skema subsidi bunga kredit. Selanjutnya, sejak di tahun 2015, KUR diterapkan dengan skema Subsidi Bunga Kredit. Skema ini ditujukan untuk menjawab tantangan utama UMKM dalam mengakses kredit dari sektor keuangan formal. Guna meningkatkan perluasan akses, maka KUR di-design dengan pemberian suku bunga kredit yang rendah karena pemerintah memberikan subsidi bunga kredit untuk UMKM, sehingga debitur KUR dapat menikmati tingkat bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan bunga pasar. Namun, pada penerapannya, skema ini tidak terlepas dari sejumlah kritik. Kajian World Bank (Indonesia Economic Quarterly, 2017) menyatakan bahwa subsidi bunga bukan kebijakan yang paling efisien dalam mendukung pertumbuhan dan Kajian Badan Kebijakan Fiskal (Kajian efektivitas subsidi bunga kur terhadap perekonomian, 2020) mengatakan bahwa tingkat efektivitas skema subsidi bunga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan skema IJP. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kajian International labour Organization (ILO, 2019) menyebutkan bahwa skema subsidi bunga untuk kredit UMKM dapat menyebabkan kebingungan di pasar kredit UMKM.

Dalam implementasi kebijakan KUR tidak dapat terlepas dari peran empat pilar instrumen utama, yakni Pemerintah sebagai regulator, Bank Penyalur, Asuradur (pihak penjamin), serta masyarakat sebagai pelaku UMKM. Harmonisasi peran keempatnya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang sehat, melalui ekosistem penyaluran KUR yang berlangsung dalam prinsip saling terkait dan saling terkoneksi.

Penyaluran KUR BRI sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 163.3 triliun dengan jumlah debitur mencapai 3.54 juta sehingga penyerapan KUR BRI terhadap outlook penyaluran nasional mencapai lebih dari 95%. Dalam tiga tahun



terakhir, NPL KUR tercatat masih terkendali dengan prosentase kurang dari 1%. Proses penyaluran KUR tidak terlepas dari aktivitas pengendalian kualitas kredit yang didukung melalui data analytics yang reliable serta penyediaan integrated risk assessment tool dalam proses kredit. Pada momentum krisis pandemi, BRI merespon dan mengantisipasi dampak covid dengan mengimplementasikan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam situasi yang challenging akibat pandemi, BRI mampu bertahan melalui strategi Business Follow Stimulus, yang berdampak pada penyaluran KUR sebesar Rp. 195 triliun (2021) dan Rp 252 triliun (2022), serta mengendalikan kualitas kredit pada range 1%. Namun demikian, imbas dari krisis pandemi tersebut, juga menimbulkan dampak kenaikan pembayaran klaim di tahun 2023 yang dominan berasal dari disbursement year mulai tahun 2021. Berdasarkan perubahan kebijakan POJK nomor 11/POJK.03/2020 dan Permenko No.2 Tahun 2020 terkait relaksasi KUR akibat Covid-19, Asuradur turut berperan dalam pengalihan risiko KUR akibat Covid-19 untuk menjaga stabilitas penyaluran kredit UMKM. Sebagai contoh di Askrindo, total pengajuan tahun 2022 sebesar Rp. 4,09 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp. 11,8 triliun tahun 2023, dibandingkan total pengajuan klaim tahun 2021 sebesar Rp. 2,08 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp. 1,43 triliun. Hal yang sama terjadi di Jamkrindo, total pengajuan tahun 2022 sebesar Rp. 4,45 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp. 11,3 triliun tahun 2023, dibandingkan total pengajuan klaim tahun 2021 sebesar Rp. 1,45 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp. 1,31 triliun. Kenaikan pengajuan klaim dimaksud juga terjadi baik pada portfolio kredit yang sudah dilakukan Restrukturisasi, maupun yang tidak dilakukan Restrukturisasi (Non-Restrukturisasi). Memperhatikan hal tersebut, sebagai bank penyalur KUR terbesar, BRI juga berperan memperkuat bisnis asuradur. BRI tercatat telah melakukan pembayaran IJP dan Subrogasi dengan nilai lebih dari Rp20 triliun kepada asuradur (Askrindo dan Jamkrindo) selama 5 tahun terakhir.

Di tahun 2024 ini, penyaluran KUR tetap berlanjut dengan target penyaluran sebesar Rp325 triliun, dimana Rp165 triliun atau 50.8% dialokasikan kepada BRI. Alokasi tersebut mendorong BRI perlu memperkuat seluruh instrumen business process KUR secara end to end berjalan dengan optimal dengan tetap memperhatikan kualitas kredit KUR agar terkendali. Terlebih, dinamika ekonomi global dan faktor risiko (downside risk) yang diprediksikan akan berkontribusi pada



perlambatan ekonomi Indonesia. Di 2024, diprediksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh terbatas dengan laju yang relative melambat (4.81-5.10%). Di tengah prospek ekonomi domestik yang masih *uncertain*, akan menyebabkan aktivitas ekonomi relatif terbatas dan stabilitas keuangan menjadi semakin ketat, sehingga default rate kredit perlu diantisipasi. Sebagai pihak penjamin, asuradur menjadi bagian dari integral penyaluran kredit yang berperan dalam tata kelola risiko serta berperan untuk mempertahankan kesehatan penyaluran kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka studi mengenai kajian KUR dalam konteks pengelolaan risiko dan perbaikan skema KUR *existing*, perlu dilakukan eksplorasi untuk semakin mendukung *positioning* KUR sebagai program kerakyatan yang semakin *impactful* dan *sustainable*. Tujuan pengadaan penyedia jasa konsultan adalah untuk memilih penyedia secara bersama-sama dengan anak perusahaan yang tergabung dalam lingkungan IFG dan BRI, yang terdiri dari:

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai holding (BPUI);
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. PT Asuransi Kredit Indonesia;
4. PT Jaminan Kredit Indonesia

B. Tujuan

Melakukan Pengadaan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembuatan Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat.

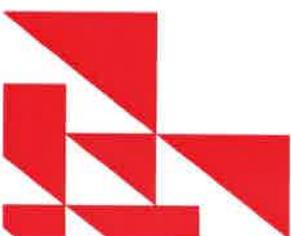
BAB II

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Hasil Pekerjaan

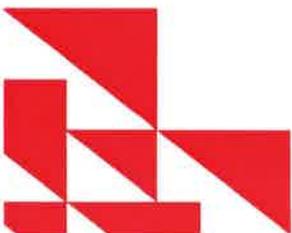
1) Ruang Lingkup Pekerjaan dan Hasil Pekerjaan

a) Ruang Lingkup

- i. Analisis dampak penyalur KUR terhadap beberapa aspek berikut:
 - Dampak KUR terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia
 - Penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan
 - Pengembangan ekonomi lokal dan nasional
- ii. Identifikasi dan analisis peran Penyalur (Perbankan) dan Penjamin (Asuradur):
 - Kinerja dan efisiensi bank-bank penyalur dalam melaksanakan program KUR



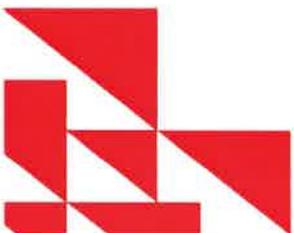
- Peran dan kontribusi penjamin dalam mendukung keberhasilan program KUR
 - Mapping risiko yang dihadapi oleh perbankan dan asuradur dalam penyaluran KUR
 - Mitigasi risiko (internal control) yang diperlukan
 - Analisis kebijakan dan regulasi internal relevansi terhadap penyaluran KUR
- iii. Melakukan kajian *vintage analysis* beserta proyeksi ke depan
- Analisa persentase pemburukan NPL dan DPK tiap bulan realisasi dan month on book (pada setiap tiering ticket size dan wilayah)
 - Analisis profil risiko dan kualitas kredit dari nasabah KUR, mencakup aspek:
 - Data perbandingan Masa Pra dan Pasca Pandemi Covid
 - KUR yang direstrukturisasi maupun yang tidak direstrukturisasiBerdasarkan komponen berikut:
 - Status dan pergerakan kolektabilitas KUR
 - Nilai baki debit loan at risk berdasarkan kolektabilitasnya
 - Status subrogasi
 - Dan parameter lain yang tepat untuk pengukuran profil risiko dan kualitas kredit
 - Analisis profil klaim KUR Pra dan Pasca Pandemi Covid-19 dan potensi klaim KUR ke depan, baik pada KUR yang direstrukturisasi maupun yang tidak direstrukturisasi (pada setiap sektor ekonomi, jenis KUR, wilayah, dan range plafond KUR)
 - Analisis peningkatan klaim KUR dengan melihat asal disbursement year dari KUR tersebut
 - Analisis profil pergerakan klaim KUR per disbursement year
- iv. Melakukan kajian skema alternatif KUR
- Analisis lingkungan UMKM, termasuk potensi debitur UMKM pengguna KUR
 - Melakukan identifikasi *key success factors* dan *key failure factors* dari penyaluran KUR



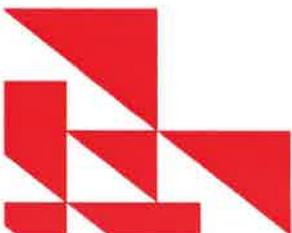
- Mengidentifikasi dan studi komparasi skema KUR historis dan eksisting
 - Mengidentifikasi *best practice* dan studi komparasi secara global dengan *benchmarking* dengan negara lain yang memiliki program *microfinance loan* atau yang sejenis.
 - Menyusun rekomendasi kebijakan best scheme yang mendukung: inklusi dan literasi keuangan (*access to finance*), graduasi kelas debitur KUR, dan penyesuaian IJP terhadap profil risiko baru.
 - Menyusun rekomendasi kriteria debitur untuk best scheme KUR yang diusulkan
 - Studi elastisitas subsidi bunga terhadap demand KUR untuk menentukan subsidi bunga yang tepat
 - Menyusun rekomendasi sektor dan jenis KUR yang menjadi prioritas dalam best scheme KUR
 - Merancang financial modelling dampak dari best scheme KUR yang direkomendasikan, dengan mempertimbangkan volume penyaluran KUR dan pendanaan subsidi KUR
 - Menyusun rekomendasi peran berbagai stakeholder KUR dalam best scheme KUR yang diusulkan
 - Menyusun rekomendasi penguatan Penyalur dan Penjamin KUR untuk mendukung best scheme KUR (seperti *innovative credit scoring, underwriting process, risk appetite, technology needs, etc.*)
 - Mengidentifikasi manfaat yang didapatkan oleh seluruh stakeholder KUR dengan adanya implementasi best scheme KUR
 - Menyusun framework graduasi dari nasabah KUR ke Kupedes berdasarkan profil nasabah KUR.
- v. Pendampingan pada saat sosialisasi dan FGD terkait hasil kajian kepada para *stakeholder* KUR (Kemenko, DJPb, BKF, KemenkopUKM, dan lainnya)

b) Hasil Pekerjaan

- i. Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan konten meliputi:



- a. Informasi yang komprehensif mengenai kontribusi perekonomian maupun kontribusi sosial terhadap penyaluran KUR bagi UMKM di Indonesia.
 - b. Hasil Analisis yang dapat digunakan oleh penjamin dan penyalur KUR terhadap berbagai jenis risiko yang terkait dengan KUR, seperti risiko kredit, pasar, operasional, dan kepatuhan. Ini termasuk evaluasi profil risiko peminjam dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kinerja usaha UMKM.
 - c. Metode dan alat untuk penjamin dan penyalur KUR dalam mengukur risiko yang teridentifikasi, termasuk analisis sensitivitas dan model vintage analysis. Fokus pada perhitungan kemungkinan default dan dampak kerugian.
 - d. Proyeksi pembayaran dan rasio dari klaim dan IJP dalam 5 (tahun) ke depan. Serta dampak pembayaran IJP terhadap keberlangsungan asuradur dalam 5 tahun terakhir.
 - e. Rekomendasi strategi dalam mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi. Dalam hal ini dapat termasuk diversifikasi portofolio, pengembangan proses penilaian kredit, pelatihan staf, penerapan kebijakan internal yang ketat, pengembangan proses underwriting, pengembangan pada teknologi, dan lainnya.
 - f. Kajian dan proposal Skema Alternatif KUR, yang mencakup keberhasilan *access to finance*, dan *staging scheme* untuk tujuan graduasi kelas debitur kur, dan perbaikan IJP sesuai profil risiko yang telah diidentifikasi pada kajian risiko kredit dan potensi kenaikan klaim.
- ii. Usulan draft kebijakan yang mengatur Terkait KUR (Permenko Bidang Perekonomian dan PMK).
 - iii. Pemaparan terkait kajian dan proposal yang telah dilakukan kepada para *stakeholder* KUR (Kemenko, DJPb, BKF, KemenkopUKM, dan lainnya) dan termasuk mempersiapkan materi untuk digunakan dalam sosialisasi dan FGD.



BAB III

Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pekerjaan yang diberikan kepada penyedia Barang dan/atau jasa untuk menyelesaikan seluruh Pengadaan Jasa Konsultan dalam RKS ini adalah maksimal selama 3 (tiga) bulan dengan prinsip lebih cepat lebih baik dan agar dicantumkan dalam surat penawaran.

BAB IV

Tenaga Ahli, Spesifikasi, dan Kualifikasi Konsultan

A. Tenaga Ahli

Konsultan yang dibutuhkan pada pelaksanaan adalah yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam kajian program pemerintah dan produk kredit produktif, yaitu:

No.	Posisi	Pendidikan	Pengalaman	Minimum Jumlah Personil
1.	<i>Partner (Asing)</i>	Min. S1	Min. 15 tahun	1
2.	<i>Partner (Lokal)</i>	Min. S1	Min. 15 tahun	1
3.	<i>Manager/ Manager Senior</i>	Min. S1	Min. 7 tahun	3
4.	<i>Senior Associate</i>	Min. S1	Min. 4 tahun	4
5.	<i>Clerk</i>	Min. S1	Min. 2 tahun	1

B. Spesifikasi dan Kualifikasi Konsultan

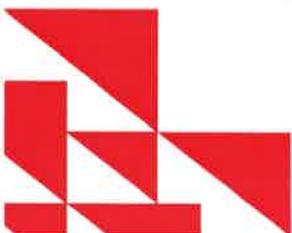
Spesifikasi dan kualifikasi konsultan yang dibutuhkan pada pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Umum

- Calon penyedia jasa konsultan yang ditunjuk bersedia untuk tunduk terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam RKS, serta tidak akan keberatan dan/atau menuntut dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian dan keputusan dari Panitia Pengadaan.
- Konsultan bersedia untuk menggunakan format kontrak dari IFG.
- Penyedia jasa yang akan bertindak sebagai konsultan tidak sedang menjalankan sanksi, baik sanksi profesi maupun sanksi hukum dari institusi yang berwenang.

2. Khusus (Kompetensi Profesional)

- Penyedia jasa memiliki pengalaman yang cukup sebagai konsultan serta merupakan konsultan yang pernah terlibat dalam proyek berskala internasional dalam bidang *microfinance loan* atau yang sejenis.



- b. Konsultan yang bertindak sebagai *Partner In Charge* ("PIC") memiliki pengalaman memberikan jasa konsultasi 15 (lima belas) tahun.
- c. Manager/Supervisor, memiliki pengalaman memberikan jasa konsultasi minimal 7 (tujuh) tahun.
- d. Memiliki kompetensi di Industri Keuangan khususnya bidang Kredit Produktif dan memiliki pemahaman yang baik terkait program penugasan pemerintah.

Bab V Peraturan Pembayaran

Peraturan pembayaran untuk Pengadaan Jasa Konsultan menggunakan sistem termin sebagai berikut:

Tahap	Persentase Pembayaran	<i>Deliverables</i> Pekerjaan
1	50%	Laporan Awal, dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima
2	50%	Laporan Akhir, dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima

Hormat Kami,

Disiapkan Oleh,



Shania Amna Sutandyo
Staf Divisi Bisnis Asuransi Umum dan
Penjaminan

Diperiksa & Disetujui Oleh,



Rosmaylinda Nasution
SEVP Manajemen Bisnis merangkap
Pelaksana Tugas Kepala Divisi Bisnis
Asuransi Umum dan Penjaminan

